



PERAN SMART CITY DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MAKASSAR

Ilham¹, Syamsul Bahri Abd Rasyid²

¹⁻²Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Email: ilhamumy16@gmail.com

<https://doi.org/10.61578/lapago.vol3.no2.art1>



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

Abstrak

Smart city merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Makassar untuk memenuhi kebutuhan daripada Masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang cepat dan mudah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Smart City dalam menunjang pelayanan publik yang ada di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian literatur/Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart City menjadikan kota Makassar sebagai salah satu kota yang mendapatkan banyak penghargaan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah luar negeri, salah satu indikator terciptanya berbagai pelayanan publik berbasis internet yang mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga menjadi kota berkembang di kawasan timur Indonesia yang cukup diperhiungkan di level nasional maupun intrnasiona, sebagai bukti bahwa masyarakat kota Makassar sangat cepat mendapatkan pelayanan dari pemerintah kota Makassar karena terpantau dengan adanya pelayanan yang menggunakan jangkauan internet sehingga pelayanan yang dilakukan pemerintah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: smart city, kebijakan publik, pelayanan publik kota Makassar



Abstract

Smart city is part of the Makassar City government's efforts to meet the needs of the community in obtaining fast and easy services. The purpose of this research is to find out Smart City in supporting public services in Makassar City. This research uses a qualitative descriptive method using literature/library studies. The results showed that Smart City made Makassar one of the cities that received many awards both from the central government and from foreign governments, one of the indicators of the creation of various internet-based public services that follow the development of existing technology so that it becomes a developing city in eastern Indonesia that is quite respected at the national and international levels, as evidence that the people of Makassar city are very quick to get services from the Makassar city government because it is monitored by services that use internet coverage so that services carried out by the government run well.

Keywords: Smart City, Public Policy, Makassar City Public Service



Pendahuluan

Perkembangan Smart City pada awalnya telah diterapkan di negara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada mulanya Smart city bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dan meningkatkan layanan publik seiring dengan perkembangan kota-kota besar khususnya kota besar yang ada di Indonesia menjadi sebuah inovasi yang telah dikembangkan sampai sekarang. Konsep dan implementasinya pun telah berkembang dan kini smart city sudah diterapkan di banyak negara di berbagai belahan dunia, salah satunya yaitu Indonesia.

Penerapan Smart city juga terjadi di sejumlah kota dan daerah di Indonesia dan kota yang telah melakukan penerapan sistem smart city antara lain kota Bandung, Surabaya, Makassar dan kota Yogyakarta. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebagaimana kota-kota besar lainnya di dunia, di Indonesia khususnya di kota-kota besar memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak. Hal ini dipicu karena kebanyakan datang dari daerah untuk mencari kebutuhan hidup sehingga menjadikan kota sebagai pemusatan fasilitas hidup layak yang lebih baik di daerah perkotaan. Dengan perkembangan jumlah penduduk yang besar, tidak merata, dan tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan beragam masalah yang terjadi. Pemasalahan yang muncul bukan saja terkait dengan masalah sosial, tapi juga lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu fakta yang terjadi sehingga smart city harus diterapkan di Indonesia terkhusus kota-kota besar yang ada di Indonesia karena notabene penduduk kota mempunyai jumlah penduduk yang besar di tambah lagi masih adanya keinginan manusia untuk memadati kota-kota besar sebagai salah satu cara untuk mencari nafkah demi keberlangsungan hidup, sehingga tidak bisa di pungkiri bahwa kota-kota besar yang memiliki penduduk lebih banyak berpotensi memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda pula. Makin banyaknya kota atau daerah di Indonesia yang menerapkan Smart City di berbagai bidang kehidupan, maka tentunya diharapkan dapat menanggulangi fenomena yang terjadi di perkotaan.

Beberapa masalah tersebut antara lain tempat tinggal yang masih jauh dari kata layak, sistem pelayanan yang tidak sesuai harapan, angka kejahatan yang meningkat, sampah, banjir, kemacetan dan lain-lain. Sehingga inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah kota yang telah menerapkan smart city untuk dapat melahirkan sebuah inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi.

Smart city merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih, untuk menerapkan konsep inovasi tersebut tentunya rumusan strategi konsep yang matang serta dukungan tidak terlepas juga dari dukungan masyarakat yang stakeholder dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Di jelaskan pula bahwa untuk dapat menangani permasalahan perlu adanya dilakukan strategi implementasi smart city yang tepat dan sesuai dengan kondisi kota sehingga permasalahan tersebut bisa teratasi. Namun, tentunya ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kota dan perlu diselesaikan agar pembangunan smart city dapat berjalan dengan lancar dan tentunya di butuhkan kerjasama dari semua stakeholder yang terlibat untuk komitmen terhadap program tersebut demi mempercepat pembangunannya.



Program Smart City di Kota Makassar menekankan pada berbagai layanan digital (aplikasi sistem berbasis web) dalam menunjang program Pemerintah Kota Makassar dan mendekatkan serta meningkatkan pelayanan ke masyarakat secara online. Program tersebut sebagai berikut:

1. Apartement Lorong (Aparong), Pemerintah Kota Makassar akan menyediakan Apartemen Lorong (Aparong) yang merupakan bagian dari program Pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Aparong diperuntukkan bagi pekerja MBR dan masyarakat kurang mampu punya lahan tapi tidak anggaran untuk membangun. Menurutnya, inovasi tersebut adalah sebuah solusi untuk menangani masalah pemukiman kumuh di lorong-lorong dengan konsep dapat di bongkar pasang. selain itu rumah ramah lingkungan itu bagi warga kurang mampu.

2. Home Care, Makassar Home Care yang lebih dikenal dengan istilah Dottoro ta`, sebuah layanan kesehatan berbasis teknologi yang ramah pada pasien karena memungkinkan dokter mengunjungi pasien di rumah-rumah.

3. Tangkasaki, Mobil sampah ini nantinya akan dilengkapi dengan CCTV yang rencananya akan di pasang didalam bak sampah untuk mengetahui dan memonitor berapa banyak sampah yang dimuat sampai ke TPA, selain untuk mengetahui apakah mobil sampah itu menjalankan operasionalnya mengangkut sampah warga atau tidak, karena masalah sampah dan kebersihan menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Danny-Ical yaitu Makassarta Tidak Rantasa (MTR).

4. Free Wi-Fi, Makassar Akan Dipasangi Wi-Fi Gratis 10 Titik di Kecamatan. Pemkot Makassar telah menggandeng PT Telkom untuk menyukseskan program ini, BUMN bidang telekomunikasi tersebut telah siap mendukung program ini. Program Makassar Smart City ini akan disosialisasikan ke masyarakat melalui media, sehingga masyarakat mengetahui program tersebut yang lebih banyak memanfaatkan IT lewat dunia maya.

5. Lorong Garden (Longgar), Longgar ini memanfaatkan lorong yang ada menjadi lebih produktif. Dimana diupayakan lorong hijau dan bersih, dengan menanam berbagai tanaman seperti sayur, tomat, cabai, dan lain lain, Danny merencanakan akan membuat badan usaha lorong, dan hasil tanaman ini akan dipasarkan sehingga menjadi nilai ekonomi warga khususnya ibu-ibu yang tinggal di lorong.

6. CCTV perkotaan, Pihak Kota Makassar terus berbenah untuk menjadikan makassar sebagai Smart City. Salah satu adalah kemudahan mendapatkan informasi Smart City dengan mengintegrasikan CCTV seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

7. Care and Rescue Center, Pemerintah kota Makassar menyiapkan “Carester” (Care and Rescue Center). “Carester” kepanjangan Care and Rescue Center masih langka di Indonesia. Pemerintah Kota Makassar, dalam misi penyelamatan atau tanggap darurat (rescue) terdapat tiga peran utama yaitu pemadam kebakaran, ambulans, dan polisi.

8. Smart Card. Program Smart City dapat dirasakan warga kota Makassar lewat Smart Card, kartu yang mengintegrasikan layanan perbankan, informasi kesehatan, kependudukan dan perpajakan.

Kota Makassar sebagai Smart City menjadi bagian dari program pemerintah kota sebagai bagian dari masyarakat global. Program ini tidaklah berjalan sendiri karena harus disandingkan dengan konsep kearifan lokal Makassar, yakni Sombere (keramahan). Dengan semangat sombere, maka interaksi antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, terbangun kebersamaan, semakin responship, tingkat improvisasi lebih tinggi,



inisiatif dan keinginan menyelesaikan masalah sesegera mungkin, solutif, inovatif, semakin terbuka untuk melakukan perubahan, pelayanan yang mampu menggabungkan antara gesture (bahasa tubuh) dan lisan yang mencerminkan kecerdasan, keluhuran pekerti dan tata krama yang tinggi. Dengan demikian merekatkan antara sombere (attitude) dan pelayanan publik merupakan inovasi baru dan cara pandang baru dalam mewujudkan reformasi birokrasi, hal ini sebagai salah komponen penting penyusun pola birokrasi yang diusung oleh Bapak walikota Makassar dan wakil walikota Makassar periode 2014-2019 dengan tagline “Dua Kali tambah Lebih Baik ($2x+\sqrt{}$), Smart City dan kota yang berkelas dunia (world class) untuk semua”.

Tentunya dalam menerapkan program smart city tidak terlepas dari yang banyaknya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Smart City, salah satunya, yaitu minimnya kinerja dan pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mewujudkan Smart City, serta tidak adanya kekuatan dalam menjalankan Smart City, baik Perda maupun Perwali. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi perkembangan kota Makassar sebagai Smart City, mengingat bahwa pemahaman dan sosialisasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan tercapainya Smart City di Kota Makassar.

Metode

Metode penelitian pada tulisan ini menggunakan kajian literatur dengan menggunakan beberapa referensi jurnal sebagai pedoman, kajian literatur digunakan agar lebih efektif dan efisien untuk mengetahui dan membandingkan kota-kota yang telah menerapkan program smart city sebagai salah satu penunjang pelayanan publik di kota Makassar.

Hasil dan Pembahasan

Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Sebagaimana diuraikan (Rukayat Y., 2017) bahwa Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik. Apabila hal-hal yang mendasar bisa terealisasi dengan baik maka tentunya akan mudah untuk melaksanakan sebuah program kerja khususnya penerapan program smart city yang ada di kota makassar yang merupakan salah satu inovasi pemerintah kota Makassar dalam melayani untuk meminimalisir hal-hal yang terjadi di dalam ruang lingkup publik.

Untuk mempertahankan agar inovasi tersebut tetap berjalan maka tentunya di butuhkan sebuah gebrakan-gebrakan baru dan manajemen profesional pelayanan publik harus lebih berorientasi pada tujuan paradigma pemerintahan yang didasarkan pada sebuah temuan-temuan baru, baik secara teori maupun praktis. Secara bersamaan, paradigma dari tujuan pemerintahan diharapkan dapat menghilangkan praktek bahwa birokrasi tidak dipandang sebagai pelayanan yang menyulitkan bagi masyarakat sehingga paradigma yang lahir di sebagian masyarakat bahwa pelayanan public hanya menghasilkan biaya yang tinggi daripada manfaat yang diperoleh, prevalensi birokrasi,



kurangnya inisiatif dan kreativitas aparatur, pertumbuhan mediokratis budaya (sebagai lawan dari budaya meritokratis) dan in-efisiensi. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Jika pemerintah, organisasi birokrasi pemerintah adalah garis depan organisasi (jalan birokrasi tingkat) terkait dengan pelayanan publik. Jika non-pemerintah, kemudian membentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang lain. Siapapun pelayanannya bentuk kelembagaan, hal yang paling penting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan.

Lahirnya inovasi smart city di kota Makassar merupakan untuk menjawab problem-problem yang terjadi salah satu diantaranya terkait pelayanan public yang belum begitu maksimal sebagaimana kita ketahui bahwa kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia bagian timur yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan padat serta memiliki berbagai suku yang pastinya memiliki banyak kebutuhan, untuk mengatur persoalan tersebut maka di butuhkan sebuah pelayan yang baik. Hal ini dikemukakan dalam teori (Fatmawati., 2013) bahwa pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu sentral telah memaksa semua pihak, baik negara dan lembaga publik untuk tampil lagi dalam peraturan pelaksanaannya. Meskipun pelayanan publik adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun, kewajiban untuk menyediakan layanan tersebut masih belum mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan kemitraan sinergis antara lembaga baik di dalam dan di luar birokrasi pemerintah. Badan-badan termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Kemitraan harus dibangun dalam lingkungan yang transparan, yang dibangun dengan komunikasi yang baik, terutama dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa kebijakan yang diformulasikan untuk memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian, kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan bisnis diharapkan untuk mendorong terwujudnya pelayanan pemerintahan, pembangunan dan publik yang lebih demokratis dan lebih profesional.

Selanjutnya untuk mencapai sebuah pelayanan public yang lebih baik maka dibutuhkan sebuah sinergitas antara pemerintah dan parahnya bawahannya/staf yang dapat menjadi sebuah panutan bagi masyarakat dan tentunya di butuhkan pula kerjasama/dukungan masyarakat sebagai pengguna pelayanan public, sejalan dengan pernyataan diatas dikemukakan pula bahwa dalam pelayanan merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan seseorang baik sebagai pimpinan maupun staf dalam memberikan contoh panutan dan tauladan dalam melayani masyarakat. Ukuran panutan/tauladan dimaksud disini adalah perilaku yang baik yang ditampilkan, sehingga yang dilayani merasa puas dan menjadi sebuah catatan tersendiri bagi pemerintah untuk menjadi sebuah referensi kedepannya. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, birokrasi pemerintah dituntut lebih efektif dan efisien sehingga akan tampak mementingkan kualitas pelayanan dan hal inilah yang menjadikan masyarakat sebagai pengguna komsumsi public menjadi tidak senang karena selain pengurusan yang lama di tambah lagi pelayanannya yang kurang maksimal. Secara universal belum terdapat keseragaman batasan tentang konsep kualitas pelayanan atau service quality, namun ada beberapa pendapat ahli tentang konsep kualitas pelayanan tersebut. Sehingga persoalan yang mendasar ini terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sebuah pelayanan public menjadi maksimal.

Smart City



Konsep smart city memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan akademisi pelaku ekonomi, maupun birokrasi pemerintahan. Di satu sisi, istilah ini berkaitan dengan penggunaan teknologi terutama ICTs dan di sisi lain berkaitan dengan ekonomi dan pemerintahan yang didorong oleh inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan yang diperankan oleh individu yang pintar (smart people).

Sebagaimana yang diuraikan oleh (Muslim, 2018) bahwa Smart City adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat, hingga untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Sebuah kota dikatakan Smart apabila kota tersebut benar-benar dapat mengetahui keadaan kota di dalamnya, memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, hingga mampu melakukan aksi terhadap permasalahan tersebut. Sedangkan dalam buku Pengenalan dan Pengembangan Smart City, kota cerdas didefinisikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya dalam uraian teori yang disampaikan (Darmawan ., 2018) Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu mengembangka sumber daya manusia, memiliki modal sosial yang baik, dan tentunya infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana maka program yang direncanakan akan berjalan dengan baik melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat maka tentunya problema yang terjadi dapat teratasi karena masyarakat secara umum merupakan pelaku dari permasalahan yang ada sehingga hadirnya inovasi smart city yang di inisiasi oleh pemerintah kota Makassar merupakan wujud daripada mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dalam mewujudkan program smart city bahwa ada beberapa dimensi yang menjadi kriteria terwujudnya smart city antara lain yaitu:

1. Ekonomi cerdas (inovasi dan persaingan), semakin tinggi inovasiinovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.
2. Mobilitas cerdas (transportasi dan infrastruktur), pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.
3. Masyarakat cerdas (kreativitas dan modal sosial), pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (economic capital), modal usaha (human capital), maupun modal sosial (social capital). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong-royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.



4. Lingkungan cerdas (keberlanjutan dan sumber daya), lingkungan cerdas adalah lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun nonfisik, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata, (Ruang Terbuka Hijau) RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan cerdas.

5. Cerdas hidup (kualitas hidup dan kebudayaan), berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.

6. Pemerintahan cerdas (pemberdayaan dan partisipasi), kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah Good Governance, yang merupakan paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip “desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing”. Mekanisme pemerintahan harus menghindari transformasi smart city menjadi “black-box,” dimana administrasi kota dan warganya kehilangan control terhadap informasi penting. Sebaliknya, keduanya harus memungkinkan data bisa digunakan untuk keputusan yang lebih baik dan transparan bagi populasi.

pemanfaatan ICT dengan menggunakan teknologi informasi tentunya dapat membuat lebih hemat penggunaan infrastruktur fisik (jalan, lingkungan dibangun dan aset fisik lainnya) dengan melalui kerjasama dan data buatan analisis untuk mendukung, pengembangan budaya yang kuat dan sehat ekonomi sosial. Kemudian dapat terlibat secara langsung dengan orang-orang lokal dalam pemerintahan lokal dan keputusan dengan menggunakan proses inovasi terbuka dan partisipasi, meningkatkan kecerdasan secara bersama-sama dari lembaga kota melalui tata pelayanan yang berbasis internet, dengan penekanan pada keikutsertaan warga dan tidak adanya perubahan. Selanjutnya belajar, memahami kondisi yang ada dan membuat sebuah gebrakan yang baru maka dengan demikian tanggapan lebih efektif dan dapat mengubah keadaan dengan cara meningkatkan kecerdasan kota.

Smart City Penunjang Pelayanan Publik di Kota Makassar

Pelayanan publik merupakan salah satu penunjang utama daripada tercapainya program smart city, karena bagian dari implementasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat sebagai pengguna public bisa memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah khususnya penerapan smart city dalam menunjang pelayanan publik di kota Makassar. Dari semua proses tersebut maka ada beberapa indikator yang menjadi problem didalam penerapannya program tersebut antara lain, yaitu:

1. Melayani masyarakat

Salah tugas daripada pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, di sisi masyarakat merupakan ujung tombak dari terciptanya sebuah program karena tanpa



adanya masyarakat maka sistem pemerintahan tidak akan berjalan. Penyebab lain bahwa pemerintah juga harus memberikan pendidikan agar masyarakat bisa memahami dan bisa menjadi pintar. Dengan adanya Smart People, diharapkan dapat tercipta komunitas masyarakat yang Smart. Kondisi Smart ini dapat diperoleh melalui sejumlah pembelajaran yang dilakukan secara kontinu. Apabila kondisi masyarakat telah menjadi Smart, maka pondasi untuk mewujudkan Smart City akan tercapai. Bentuk terapan Smart City pada satu atau beberapa bidang kehidupan pada kota makassar akan berhasil dengan adanya partisipasi masyarakat setempat yang smart, sehingga mampu mengetahui manfaat yang akan di peroleh dan bagaimana mengelola serta mengembangkan Smart City tersebut untuk menciptakan tatanan kehidupan dan kualitas layanan publik yang lebih baik.

2. Mengelola satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

Keberadaan SKPD atau organisasi perangkat daerah merupakan salah satu kesatuan yang utuh yang mempunyai program kerja masing-masing yang tentunya dapat memberikan dampak yang baik di dalam menunjang program-program yang ada di kota Makassar, tetapi SKPD didalam menjalankan program kerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah kota Makassar. Disisi lain terlalu banyaknya SKPD yang berada didalam lingkup pemerintah kota Makassar menjadi salah satu permasalahan yang di hadapi belum lagi dalam pembuatan program kerja yang dilakukan satu SKPD dengan SKPD lainnya yang hampir sama sehingga dalam pelaksanaannya tidak maksimal. Sehingga lahirnya program smart city untuk memberikan solusi yang begitu baik untuk menunjang pelayanan public di kota Makassar, SKPD yang dileburkan dengan SKPD lainnya menjadi satu antara lain: Dinas pertanian dan kebersihan bergabung ke badan lingkungan hidup daerah sehingga membentuk Dinas lingkungan hidup, badan pendidikan dan pelatihan bergabung dengan badan kepegawaian daerah menjadi badan kepegawaian dan pengembangan swadaya aparatur, selanjutnya dinas perikanan pertanian dan peternakan bergabung dibadan ketahanan pangan menjadi badan ketahanan pangan pertanian dan peternakan dan dinas perumahan dan gedung daerah bergabung dengan ke dinas pekerjaan umum menjadi dinas pekerjaan umum dan perumahan, belum lagi masalah lain yaitu SKPD yang belum mempunyai tempat untuk disatukan.

3. Kemiskinan.

Kita tidak pungkiri bahwa keberadaan dan berkembangnya suatu kota besar tentu tidak terlepas daripada masih banyaknya masyarakat yang miskin sehingga menjadi masalah yang ada di kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota Makassar. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah kota Makassar di dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara membuat lorong garden atau lorong hijau, meskipun keberadaan program ini cukup aneh tetapi inovasi yg lahir dari ide-ide pemerintah kota Makassar merupak penunjang daripada pelayanan public, keberadaan lorong garden bukan hanya untuk memperindah lorong menjadi hijau akan tetapi dimanfaatkan oleh sebahagian masyarakat miskin untuk membantu perekonomian dengan cara menanam sayuran seperti Lombok, tomat, kangkung yang tentunya dari hasil itu dapat dijual sebagai salah satu pendokrat perekonomian masyarakat kota Makassar.

4. Pengendalian wilayah kota.

Kota adalah area yang memiliki berbagai masalah jika tidak dikelola dengan benar. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, Smart City hadir untuk menawarkan



perbaikan pada masalah perkotaan dalam pelayanan public. Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga memeriahkan keberadaan Kota Pintar di Indonesia yang tentunya memiliki permasalahan yang harus diselesaikan. Implementasi Smart City yang memiliki kompleksitas tinggi yang harus didukung oleh regulasi yang kuat. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Makassar memformulasikan kebijakan Kota Cerdas Kota Makassar. Masalah yang muncul tentunya bagaimana pemerintah yang merupakan pelayan public dapat membuat sebuah regulasi sehingga mengurangi dampak yang ada di wilayah tersebut, sebagaimana kita ketahui bahwa kota Makassar merupakan wilayah yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa daerah sehingga mudah di akses oleh masyarakat dari daerah tersebut.

5. Kualitas Hidup Masyarakat Kota Makassar.

Kota Makassar merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk besar yang memiliki banyak suku didalamnya dan budaya yang berbeda, mayoritas penduduk kota Makassar adalah bugis Makassar tetapi tentu ada suku yang lain yang menjadi masyarakat kota Makassar yang menjadi pembeda akan tetapi perbedaan itu bukan menjadikan kota Makassar menjadi unik tetapi menjadikan kota Makassar memiliki banyak permasalahan, karena tentunya setiap suku pasti memiliki karakteristik budaya yang berbeda bahkan hubungan status sosial juga yang dapat mengakibatkan sebuah komplik. Maka untuk menjaga agar masyarakat kota Makassar menjadi hidup rukun dan damai maka lahirlah program yang menjadi penunjang untuk kualitas hidup kota Makassar yaitu Makassar sumber atau Makassar yang ramah, sombere sebagai heartware (perangkat hati) yang menghubungkan antara hati dan pikiran. Sombere, adalah warisan kultur lokal Makassar yang bermakna sangat dalam. Dia merupakan bentuk great humble, great hospitality, serta great brotherhood. "Smart city membuat setiap kota sederajat, namun somberelah yang membuat kita lebih dari itu karena istilah "sombere" merupakan salah satu nilai budaya dan nilai keramahan khas yang ada di Makassar. Karakter suku bugis Makassar yang mendominasi kota ini, ramah dan bersahabat serta mempunyai kepedulian tinggi terhadap sesama memungkinkan siapa saja dapat berasimilasi dan beradaptasi secara leluasa. Sifat keterus-terangan, apa adanya, dan tanggung jawab yang besar yang ditunjukkannya, serta rasa mengayomi dan melindungi, sehingga siapa saja akan merasa aman ketika berada di Makassar. Konsep sombere akan sangat ditentukan aparat pelayanan publik serta warga kota yang wellcome terhadap pendatang.

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian/ penjelasan diatas maka penulis dapat narik sebuah kesimpulan terkait penerapan smart city sebagai penunjang pelayan public di kota Makassar antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan smart city dalam menunjang pelayanan publik di kota Makassar cukup berjalan baik dengan menjadikan kota Makassar sebagai salah satu kota yang mendapatkan banyak penghargaan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah luar negeri.

2. Lahirnya program smart city di kota Makassar merupakan salah satu indikator terciptanya berbagai pelayanan publik berbasis internet yang mengikuti perkembangan teknologi yang ada sehingga menjadi kota berkembang di kawasan timur Indonesia yang cukup diperhiungkan di level nasional maupun internasional.

3. Keberadaan program smart city menjadi bukti bahwa masyarakat kota Makassar sangat cepat mendapatkan pelayanan dari pemerintah kota Makassar karena terpantau



dengan adanya pelayanan yang menggunakan jangkauan internet sehingga pelayanan yang dilakukan pemerintah berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Allam, Z., & Newman, P. (2018). smart cities Redefining the Smart City: Culture, Metabolism and Governance, 4–25. <https://doi.org/10.3390/smartcities1010002>
- Anindra, F., & Min, D. M. (2018). Smart City Implementation Modelling in Indonesia with Integration Platform Approach, (September), 43–48.
- Anthopoulos, L., & Janssen, M. (2015). Comparing Smart Cities with Different Modeling Approaches, 1997, 525–528.
- Darmawan, E., (2018). PERKEMBANGAN SMART CITY KOTA TANJUNGPINANG Eki Darmawan, 2(2), 60–78.
- Fatmawati, (2013). Kemitraan dalam pelayanan publik: sebuah penjelajahan teoritik, (259), 91–101.
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu, (2), 56–65.
- Harlina, S., Mustafa, M. S., & City, S. (2018). Teknologi Informasi dalam Smart City di Makassar, 3(c), 8–9.
- Hollands, R. G. (2015). Critical interventions into the corporate smart city, (August 2014), 61–77. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsu011>
- Idil, A., & Budi, S., (2018). E-partisipasi dalam pembangunan lokal (studi implementasi, 8–12.
- Meijer, A., & Rodri, M. P. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung Siti Widharetno Mursalim, 14, 126–138.
- Muslim, A. (2018). KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, 6(4), 1547–1560.